

Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Tingkat Korupsi Dengan Budaya Sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Alif Nur Irvan*¹, Dian Kartika Rahajeng²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Good Corporate Governance (GCG) pada sebuah negara, budaya nasional dan kondisi ekonomi suatu negara dengan tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diterbitkan oleh transparency international, indeks budaya dari hosftade insight, dan GDP per kapita dari worldbank. Data yang diambil dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG dan kondisi ekonomi masih menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara. dengan dimasukkannya variabel budaya yang ada pada negara tersebut, efek GCG dan kondisi ekonomi pada korupsi menjadi tidak stabil pada berbagai tingkat signifikansi. Penelitian ini menjadikan budaya sebagai variable moderasi variabel GCG dan kondisi ekonomi terhadap tingkat korupsi sebuah negara. Penelitian menggunakan teori institusi dan teori agensi untuk meneliti antara GCG budaya serta teori segitiga kecurangan dalam meneliti korupsi dengan kondisi perekonomian pada suatu negara.

Kata Kunci : Good Corporate Governance;Budaya Nasional;Kondisi Ekonomi, Korupsi

1. Pendahuluan

Kecurangan merupakan hal yang banyak terjadi di masyarakat saat ini. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE (2017) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dan merugikan banyak pihak lainya. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan ada 3 jenis kecurangan utama yang sering terjadi yaitu kecurangan pelaporan keuangan, kecurangan dalam penyalahgunaan aset, dan korupsi. Survei dari ACFE (2017) juga mengungkapkan bahwa sistem pengendalian anti fraud pada sebuah organisasi didominasi oleh sistem pengendalian internal serta tata kelola ataupun governance yang baik dalam perusahaan. Kebijakan manajemen tingkat atas mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan yang terjadi. Dengan kata lain GCG sangat berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian sebuah kecurangan.

Good Corporate Governance menurut OECD (The Organisation for

Economic Co- Operation and Development) G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) adalah seperangkat peraturan yang akan membantu dalam membangun lingkungan bisnis yang dapat dipercaya, transparan, dan akuntabel yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif. Selain itu G20/OECD Principles of Corporate Governance (2015) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan Good Corporate Governance pada sebuah perusahaan, membuat lingkungan bisnis menjadi lebih sehat sehingga dapat mengurangi potensi terbentuknya lingkungan bisnis yang tidak sehat dimana terdapat potensi terjadinya kecurangan didalamnya.

Beberapa literatur terdahulu telah memberikan hasil yang signifikan antara GCG dengan tingkat korupsi yang terjadi pada suatu negara. Hasil penelitian dari Sullivan, et al (2013) , Agyei-Mensah (2017), Morck et al., (2005) dan Li & Harrison (2008) menyatakan bahwa adanya GCG yang baik pada sebuah organisasi makan hal

itu dapat menurunkan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Selain tata kelola perusahaan penting dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi, variabel lain perlu dipertimbangkan dalam hal mengurangi tingkat korupsi seperti budaya dan kondisi ekonomi (Kimbrow, 2002).

Menurut IMF (2020) kondisi ekonomi sebuah negara mengacu pada keadaan ekonomi yang berkaitan dengan permintaan penawaran, produksi barang dan jasa, ketenagakerjaan serta pendapatan per kapita pada suatu negara atau wilayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2021), Bardhan (2006), (Treisman, 2000) dan Getz & Volkema (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa korupsi banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga keadaan sosial masyarakat. Negara berkembang lebih cenderung banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara maju yang minim akan kasus korupsi di dalamnya.

Selain dua faktor diatas, penyebab kasus korupsi yang terjadi dalam suatu negara sangat luas dan disebabkan oleh banyak faktor lain. Faktor lain yang memberikan dampak terhadap korupsi di suatu negara ialah

norma sosial serta budaya yang ada dalam negara tersebut. Greif (1994) budaya nasional merupakan seperangkat norma dan keyakinan sosial yang membawa masyarakat ke sebuah keseimbangan tertentu. Adapun Chiu et al (2010) mendefinisikan budaya sebagai seperangkat nilai, norma, dan kepercayaan yang terbentuk dari sekelompok orang. Hofstede (2011) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman mental kolektif dari pikiran manusia yang membedakan antar satu kelompok orang dengan kelompok yang lainnya.

Kondisi budaya masyarakat dalam sebuah perusahaan dan negara dapat menentukan seberapa besar tingkat korupsi itu terjadi. Fenomena ini terjadi dikarenakan budaya masyarakat dalam sebuah negara dapat mempengaruhi fenomena sosial pada kelompok masyarakat yang tinggal pada negara tersebut (Seleim & Bontis, 2009). Selain itu House et al. (2002) Achim (2016) dan Park (2003) menyatakan bahwa setengah dari tingkat korupsi di sebuah negara dapat dijelaskan berdasarkan budaya negara tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya nasional dapat

membantu menjelaskan tingkat korupsi dari masing-masing negara

Sebagian besar dari penelitian diatas hanya melihat hubungan langsung antara GCG, kondisi perekonomian, serta budaya terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Penelitian ini akan menggunakan budaya sebagai variabel moderasi yang akan memoderasi hubungan antara GCG terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tata kelola organisasi yang baik tidak bisa lepas dari budaya nasional yang ada dalam sebuah negara (Li & Harrison, 2008). Selain itu, penelitian ini juga akan menjadikan budaya sebagai variabel moderasi antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara yang melengkapi penelitian dari (Getz & Volkema, 2001). Dengan menjadikan budaya sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih luas terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

1. Teori dan tinjauan pustaka

a. Teori keagenan

Teori keagenan adalah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah dalam hubungan antara pemilik bisnis dengan manajemen ataupun pemerintah dengan rakyat yang ada pada sebuah negara. Masalah ini dapat terjadi ketika seseorang (principal) mempekerjakan orang lain dan mendelegasikan tugas, wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen (Michael & Meckling, 1976).

Agen dikatakan gagal untuk dapat memenuhi kepentingan prinsipal (publik) ketika agen menyalahgunakan kapasitasnya sebagai pejabat publik atau pegawai perusahaan untuk memenuhi keuntungan pribadi. Masalah ini terjadi karena prinsipal dan agen belum tentu memiliki kepentingan yang sama. Inti yang mendasari teori principal-agent adalah fakta bahwa prinsipal dan agennya sama-sama berharap untuk memaksimalkan wewenang mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

b. Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory atau sering disebut dengan teori segitiga kecurangan merupakan sebuah teori yang di kembangkan sorang kriminolog yang meneliti tentang

white-collar crime yang bernama Donald Cressey. Cressey (1953) berteori tentang tiga komponen sebagai faktor yang mendasari untuk menjelaskan motivasi dibalik keputusan individu untuk melakukan kecurangan. Komponen-komponen tersebut, seperti “tekanan”, “kesempatan” dan “rasionalisasi”.

Menurut Albrecht et al. (2009) menyatakan bahwa tekanan yang dirasakan seseorang dapat dihasilkan dari berbagai keadaan, tetapi sering kali melibatkan tekanan terhadap kebutuhan keuangan. Tekanan keuangan memiliki dampak besar pada motivasi karyawan dan dianggap sebagai jenis tekanan yang paling umum. Secara khusus, sekitar 95% dari semua kasus penipuan telah dipengaruhi oleh tekanan keuangan. Kesempatan dalam hal mirip dengan tekanan yang dirasakan karena kesempatan tidak harus terlihat secara jelas. Pelaku kecurangan hanya harus percaya atau merasakan bahwa peluang itu ada. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah risiko tertangkap, semakin besar kemungkinan penipuan akan terjadi (Cressey 1953). Selain itu Vona, (2008) berpendapat bahwa dalam

melakukan kecurangan, seseorang harus memiliki akses ke aset atau mengelola prosedur kontrol yang memungkinkan untuk bisa menjadi sebuah kecurangan. Posisi seseorang, serta tanggung jawab dan wewenangnya, juga berkontribusi pada peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Elemen ketiga dari teori ini adalah rasionalisasi. Konsep ini menunjukkan bahwa pelaku harus merumuskan beberapa jenis rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi mengacu pada pembenaran bahwa perilaku tidak etis adalah sesuatu selain kegiatan kriminal. (Cressey, 1953). Pada dasarnya, rasionalisasi adalah keputusan sadar oleh pelaku untuk menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan orang lain. Proses keputusan etis bervariasi menurut individu, budaya, dan pengalaman (Vona, 2008).

c. Penelitian terdahulu

Terdapat banyak penelitian yang meneliti tentang dampak GCG, kondisi perekonomian dan budaya terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Beberapa penelitian terkait GCG dengan tingkat

korupsi yang terjadi pada sebuah negara antara lain penelitian Agyei-Mensah, (2017) Boateng et al.(2021) dela Rama, (2012), Fu, (2019), dan Sullivan et al, (2013). dari beberapa penelitian ini memberikan bukti empiris bahwasanya GCG dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Selain itu pengutan internal dalam organisasi juga menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi.

Selain itu, penelitian terkait kondisi perekonomian terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara telah dilakukan oleh Getz & Volkema, (2001), Kimbro, (2002), Omid et al. (2017), Saha & Gounder, (2013), Sharma & Paramati, (2021), dan Wraith & Simpkins, (2012). Pada penelitian sebelumnya ini peneliti menyatakan bahwa kondisi perekonomian sebuah negara sangatlah erat hubungannya dengan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Negara dengan tingkat perekonomian yang rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi daripada negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi yang

memiliki tingkat korupsi yang cenderung rendah.

Adapun budaya juga telah banyak diteliti untuk mengukur tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Penelitian terdahulu dari (Achim, (2016), Boateng et al. (2021), Fischer et al. (2014), Getz & Volkema, (2001) Mensah, (2014), Park, (2003), dan Seleim & Bontis, (2009). dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa budaya masih menjadi faktor dalam menggambarkan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini dikarenakan terjadinya korupsi bukanlah sekedar fenomena ekonomi tetapi fenomena social sehingga budaya masih memegang peran penting didalamnya.

d. Hipotesis penelitian

1. Pengaruh good corporate governance terhadap tingkat korupsi sebuah negara

Dalam menjalankan organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan sangat lekat dengan teori agensi yang menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam hal ini, hal yang mendasari agensi teori adalah fakta bahwa prinsipal dan agen sama-sama berharap

untuk memaksimalkan utilitas mereka (Jensen & Meckling, 1976). Hal inilah yang mendasari adanya praktik GCG dalam perusahaan, organisasi maupun pemerintahan perlu dilakukan.

GCG adalah sebuah struktur dan proses bagaimana dan kemana sebuah organisasi atau perusahaan itu dikendalikan dan diarahkan. Selain itu, GCG ini menyediakan mekanisme kontrol antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Menurut Sullivan et al. (2013) empat prinsip tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari transparansi, akuntabilitas, keadilan (fairness), dan tanggungjawab. Dengan adanya 4 unsur ini, maka segala tindak kecurangan termasuk dengan korupsi tidak terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Agyei-Mensah (2017) dan Farber (2005) yang membuktikan bahwa negara dengan tingkat tata kelola yang baik lebih cenderung sedikit terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara dengan tingkat tata kelola yang rendah.

Dengan adanya praktik tata kelola organisasi yang baik yang diterapkan dalam sebuah perusahaan maka akan dapat meningkatkan kinerja manajemen dan perusahaan serta dapat mengurangi tingkat korupsi yang

terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tata kelola perusahaan yang baik akan menumbuhkan transparansi, akuntabilitas, keadilan dan tanggungjawab sehingga dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang jauh dari praktik-praktik yang tidak etis termasuk didalamnya praktik korupsi. Dari penjelasan diatas penelitian ini akan mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

2. Pengaruh kondisi perekonomian terhadap tingkat korupsi sebuah negara

Pendapatan per kapita dari sebuah negara secara umum masih menjadi penyebab terjadinya kecurangan pada sebuah negara. Secara teori kecurangan atau korupsi sangat erat dengan teori keagenan yang melekat pada pemerintah dan rakyat yang ada pada suatu negara. Banyak negara dengan pendapatan rendah menjadi lebih rentan terhadap korupsi daripada negara dengan pendapatan yang tinggi (Omidi et al. 2017). hal ini dapat dikarenakan para aparat negara di negara berpenghasilan rendah

menerima upah yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan mereka dapat berbuat kecurangan dan bisa saja berbuat korupsi dan melegalkan tindak penyuapan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Leys, 1965).

Beberapa literatur telah banyak membahas tentang bagaimana dampak kondisi perekonomian serta GDP dari sebuah negara terhadap kecurangan yang terjadi pada sebuah negara antara lain Saha & Gounder, (2013), Bai et al. (2013) dan Kim et al. (2017) dan (Sharma & Paramati, 2021). Pada penelitian diatas telah banyak dibahas bagaimana dampak dari perekonomian sebuah negara terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Adapun Bardhan (2006) yang menyatakan bahwa negara dengan tingkat (PDB) yang lebih rendah lebih cenderung mempunyai perilaku lebih korup daripada negara dengan tingkat PDB yang lebih tinggi.

Negara dengan tingkat perekonomian yang rendah akan cenderung lebih banyak terjadinya korupsi dibandingkan dengan negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan perekonomian masyarakat di negara tersebut dapat

terpenuhi dan terbagi secara merata sehingga menyebabkan adanya tekanan finansial yang mendorong seseorang berbuat tindak kecurangan. Hal ini sejalan dengan teori segitiga kecurangan yang menyebutkan bahwa terdapat 3 sebab seseorang melakukan kecurangan yaitu kesempatan, rasionalisasi dan tekanan (Cressey, 1953). Selain itu, terdapat biaya yang harus dikeluarkan dalam mengurangi korupsi. Dari penjelasan diatas maka penelitian ini mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Kondisi perekonomian sebuah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara

2. Budaya nasional memoderasi hubungan antara Good Corporate Governance dan tingkat korupsi suatu negara.

Pada teori kecurangan yang terjadi pada sebuah organisasi, salah satu penyebab terjadinya kecurangan pada organisasi didominasi dengan adanya konflik kepentingan yang erat kaitanya dengan teori keagenan yang melekat pada pemerintah, rakyat, organisasi, serta pemangku kepentingan. Masalah ini terjadi karena prinsipal dan agen belum tentu

memiliki kepentingan yang sama. Inti yang mendasari teori principal-agent adalah fakta bahwa prinsipal dan agennya sama-sama berharap untuk memaksimalkan wewenang mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Adapun budaya adalah komponen tidak bisa dipisahkan dari lingkungan di mana bisnis beroperasi. Isu utama dalam operasional bisnis yang beroperasi diberbagai negara adalah memahami, dan mungkin beradaptasi dengan, budaya yang berbeda. Untuk bisnis internasional, budaya penting karena mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam studi korupsi, nilai-nilai budaya penting karena mempengaruhi keputusan tentang apakah akan terlibat dalam transaksi korupsi. Meskipun dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa korupsi hanyalah masalah budaya, memang benar bahwa di beberapa budaya ada norma-norma sosial yang dapat menyebabkan individu kurang menekankan pada pencegahan korupsi (Tanzi, 1994).

Hofstede, (2001) menggambarkan budaya Power distance merupakan salah satu budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya

korupsi. Budaya power distance pada sebuah negara digambarkan sebagai sebuah ketidaksetaraan dalam sebuah pendistribusian kekuasaan dalam organisasi. Hal ini erat dengan organisasi yang menginginkan kekuasaan yang dibagi dengan tidak merata ataupun hanya terhadap orang-orang tertentu sehingga kesenjangan terjadi didalamnya (Hofstede, 2011). Semakin besar jarak kekuasaan, semakin kecil kemungkinan individu akan menentang otoritas dan aturan, yang mungkin mengarah pada tingkat korupsi yang tinggi (Mensah, 2014). Adanya mekanisme tata kelola organisasi yang baik dan benar yang berpegang teguh terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan keadilan dan diperkuat dengan adanya budaya jarak kekuasaan yang rendah sebuah negara maka tingkat korupsi yang terjadi akan menurun.

Dalam budaya individualis, Hofstede, (2001) menggambarkan budaya individualism merupakan salah satu budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Dalam dimensi budaya individualis, budaya ini dikenal dengan adanya kesenjangan antar

individu satu sama lain dalam tatanan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat individualis yang sangat erat dengan kesendirian yang lebih peduli dengan dirinya sendiri. Kyriacou (2016) menyatakan dalam budaya individualism seseorang ataupun masyarakat akan bergerak berdasarkan norma dan tindakan yang objektif yang diterima secara umum.

Adanya persyaratan tata kelola yang baik untuk kepentingan pemangku kepentingan, maka individualisme sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan tata kelola organisasi yang baik dalam kaitannya mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara. Maka semakin baik corporate governance di sebuah negara didukung dengan tingginya budaya individualisme yang ada pada sebuah negara maka hal ini akan menurunkan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini dikarenakan sifat individualis cenderung memikirkan dirinya sendiri tanpa harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar mereka seperti saudara ataupun keluarga yang akan memicu praktik nepotisme yang akan berdampak tidak sehat terhadap tata kelola organisasi.

Masculinity menurut Hofstede, (2001) mengacu pada sejauh mana nilai-nilai seperti ketegasan, agresi dan daya saing dihargai. Dalam budaya maskulin, kesuksesan diukur dengan pencapaian yang diciptakan atau diperoleh (Geert Hofstede, 2011). Ketegasan yang merupakan karakteristik dari budaya maskulin membuat budaya yang berisikan moral akan lebih dijunjung (Getz & Volkema, 2001). Sedangkan GCG adalah sebuah struktur dan proses bagaimana dan kemana sebuah organisasi atau perusahaan itu dikendalikan dan diarahkan. Dengan penerapan corporate governance yang baik maka akan mengharuskan organisasi untuk bisa memberikan hal terbaik dan akuntabel serta transparansi informasi untuk semua pemegang kepentingan (Agyei-Mensah, 2017). Vitell et al. (1993) mencatat bahwa budaya yang dicirikan oleh maskulinitas cenderung kurang sensitif terhadap masalah moral. (Davis & Ruhe, 2003).

Dengan tingginya budaya maskulinitas yang cenderung memiliki ketegasan, daya saing tinggi, dan agresif membuat praktik GCG dalam sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat

korupsi yang terjadi pada sebuah organisasi. Maka dari itu, atas dasar pemaparan diatas penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan tingginya budaya maskulinitas yang ada pada sebuah perusahaan akan memperbaiki praktik GCG yang ada sehingga menjadikan tingkat korupsi yang terjadi akan cenderung menurun.

Uncertainty avoidance (UAI) atau penghindaran ketidakpastian merupakan sebuah budaya masyarakat yang bisa diartikan dengan tingkat toleransi dari masyarakat atas hal-hal yang mengandung ambiguitas. Hal ini menandakan adanya masyarakat yang merasa sebuah ketidaknyamanan terhadap situasi yang tidak tertata dan tidak terstruktur (Geert Hofstede, 2011). Dalam budaya ini masyarakat erat dengan menjauhi kemungkinan yang buruk yang menyimpang terhadap hukum maupun keyakinan atas sebuah kebenaran. Getz & Volkema (2001) menyatakan Penghindaran ketidakpastian (UAI) adalah sejauh mana seseorang dalam masyarakat menoleransi penyimpangan dan risiko.

Dalam masyarakat dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi, anggota masyarakat lebih cenderung merasa tidak nyaman dalam

menghadapi situasi yang tidak terduga karena mereka cenderung lebih menyukai stabilitas dan institusi yang kuat. Boateng et al. (2021) dalam tata kelola organisasi ketidakpastian memegang peran penting dalam kaitannya mencegah tindak korupsi yang terjadi didalam organisasi. Dalam kaitannya dengan korupsi yang terjadi di sebuah negara, maka semakin tinggi uncertainty avoidance akan meningkatkan tingkat korupsi yang ada pada negara tersebut. Dengan begitu, tata kelola organisasi dengan penghindaran ketidakpastian yang tinggi akan meningkatkan korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Hofstede, (2001) menggambarkan budaya long-term orientation merupakan salah satu budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Budaya dan kebiasaan yang berorientasi jangka panjang merupakan sifat yang selalu memikirkan dan berperilaku untuk mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang. Hal ini erat kaitannya dengan keuntungan yang akan dihasilkan dan dinikmati dimasa yang akan datang (Hofstede, 2011). Orientasi jangka panjang atau long-term

orientation mengukur hubungan antara masa lalu, sekarang dan masa depan. Masyarakat dengan tingkat orientasi jangka panjang yang tinggi dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan dan hal-hal baru dengan cepat dan lebih mungkin untuk menantang dimasa yang akan datang (Mensah, 2014).

Achim (2016) menjelaskan bahwa negara dengan budaya yang cenderung berorientasi terhadap jangka panjang menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung memikirkan masa depan mereka untuk bisa hidup dengan baik. Boateng et al. (2021) berpendapat bahwa dengan masyarakat yang cenderung memikirkan jangka panjang akan berdampak pada tata kelola organisasi yang ada sehingga memunculkan perilaku untuk melakukan hal-hal yang tidak etis.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan budaya masyarakat yang cenderung berorientasi jangka panjang dan menginginkan kehidupan yang baik dimasa akan datang akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap tata kelola organisasi. Hal ini dikarenakan seseorang bisa saja tidak mematuhi tata

kelola perusahaan yang baik hanya karena ingin memiliki kehidupan yang baik dimasa yang akan datang sehingga menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan yang menyalahi hukum termasuk melakukan korupsi.

Hofstede, (2001) menggambarkan budaya uncertainty avoidance merupakan salah satu budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi. Budaya indulgensi merupakan sebuah budaya yang erat dengan sebuah kebebasan dimana masyarakat mempunyai kebebasan dalam melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa puas dan senang. Sebaliknya, pengekanan identik dengan pembatasan terhadap sesuatu yang membuat individu tidak bisa berbuat sesuai yang ia inginkan (Hofstede, 2011). Indulgence versus restraint (IVR) adalah ukuran terpenuhinya kebahagiaan seseorang yang ada dalam masyarakat. Sebuah masyarakat dengan tingkat indulgensi yang tinggi memungkinkan anggotanya untuk secara bebas menikmati hidup dan mengendalikan hidup mereka sendiri, sedangkan tingkat indulgensi yang rendah membatasi tingkat kesenangan dan kehidupan masyarakat

(Achim, 2016). Negara dengan tingkat kebebasan yang tinggi cenderung mempunyai tingkat penyimpangan terhadap perilaku etis yang rendah (Achim, 2016). Dengan tingkat Indulgence yang rendah pada sebuah negara maka akan memungkinkan terjadinya korupsi pada negara tersebut akan berkurang.

Untuk menguji efek moderasi dimensi budaya pada hubungan antara CG dan korupsi, kami mengusulkan hipotesis berikut:

H3a: Power distance memperlemah hubungan negatif antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H3b: Individualism memperkuat hubungan negatif antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H3c: Masculinity memperkuat hubungan negatif antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H3d: Uncertainty avoidance memperlemah hubungan negatif antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H3e: Long-term orientation memperlemah hubungan negatif

antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H3f: Indulgence secara memperlemah hubungan negatif antara corporate governance dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara

3. Budaya nasional memoderasi hubungan antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi sebuah negara.

Pendapatan per kapita dari sebuah negara secara umum masih menjadi penyebab terjadinya kecurangan pada sebuah negara. Banyak negara dengan pendapatan rendah menjadi lebih rentan terhadap korupsi daripada negara dengan pendapatan yang tinggi (Omidi et al. 2017). hal ini dapat dikarenakan para aparat negara di negara berpenghasilan rendah menerima upah yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan mereka dapat berbuat kecurangan dan bisa saja berbuat korupsi dan melegalkan tindak penyuapan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Leys, 1965). Dengan adanya penyuapan dan korupsi yang terjadi di kalangan atas ini yang menyebabkan harga produktivitas menjadi mahal

sehingga rakyat menjadi korban dalam hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori segitiga kecurangan yang menjadikan tekanan keuangan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kecurangan.

Kondisi perekonomian suatu negara dapat menggambarkan banyak hal termasuk didalamnya korupsi yang terjadi pada negara tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sharma & Paramati (2021) yang menyatakan bahwasanya kondisi perekonomian dan keuangan dari sebuah negara mempunyai hubungan yang erat dengan kasus korupsi yang terjadi pada negara tersebut. Selain itu, budaya juga menjadi faktor penting dalam menggambarkan korupsi yang terjadi pada sebuah negara hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahasawannya budaya menjadi mempunyai peran penting dalam mengatasi tingkat korupsi yang terjadi Scholl & Schermuly (2020), Achim (2016), Park (2003), Getz & Volkema (2001).

Disisi lain, budaya adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari lingkungan di mana bisnis beroperasi. Dalam studi korupsi, nilai-

nilai budaya penting karena mempengaruhi keputusan tentang apakah akan terlibat dalam transaksi korupsi. Meskipun terdapat beberapa mitos bahwa korupsi hanyalah masalah budaya, tetapi jika dilihat lebih dalam terdapat bukti bahwa di beberapa budaya ada norma-norma sosial yang dapat menyebabkan individu kurang menekankan pada pencegahan korupsi (Tanzi, 1994).

Hofstede, (2001) menggambarkan salah satu dimensi budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi adalah power distance. Budaya jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki sosial yang kaku lebih disukai dan dipertahankan dalam suatu budaya. Dalam budaya jarak kekuasaan tinggi, orang percaya bahwa ada pemisahan yang tepat dan tidak dapat dijembatani antara kelas sosial ekonomi (Getz & Volkema, 2001). Dengan adanya hierarki yang terjadi pada pemerintahan, sektor swasta dan lain sebagainya maka akan memunculkan ketidaksetaraan dalam perekonomian sehingga akan menimbulkan sebuah pemerasan dan

tindak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Dengan tingginya hierarki kekuasaan dan keinginan dalam pendistribusian kekuasaan yang tidak merata maka akan menimbulkan banyak potensi penyimpangan yang terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Sebagian kelompok ingin menikmati kekuasaan sehingga dapat menguntungkan diri sendiri. Atas dasar inilah maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian dan tingkat jarak kekuasaan yang tinggi akan meningkatkan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Dalam dimensi budaya individualis, budaya ini dikenal dengan adanya kesenjangan antar individu satu sama lain dalam tatanan masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat individualis yang sangat erat dengan kesendirian yang lebih peduli dengan dirinya sendiri. Lain daripada itu, karakteristik kolektivitas adalah karakter dari masyarakat yang menunjukkan adanya ikatan erat antar satu individu dengan individu lainnya. (Geert Hofstede, 2011). Kyriacou (2016) menyatakan dalam budaya Individualism seseorang ataupun masyarakat akan bergerak

berdasarkan norma dan Tindakan yang objektif yang diterima secara umum. Sedangkan collectivism akan sedikit sulit untuk menerapkan dan menjalankan peraturan yang diterima secara umum. Konsekuensi dari budaya ini adalah munculnya nepotisme, dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Getz & Volkema (2001) menyatakan bahwa kemakmuran ataupun kemajuan ekonomi sebuah negara yang didukung dengan individualisme yang tinggi akan mendorong individu untuk melakukan perilaku yang tidak etis secara kolektif. Dengan tingginya kondisi perekonomian sebuah negara dan didukung dengan tingginya tingkat individualisme dari budaya negara tersebut maka tingkat korupsi yang akan terjadi pada sebuah negara akan berkurang. Hal ini dikarenakan Individualism bergerak berdasarkan norma dan tindakan yang objektif dan tidak memikirkan keluarga dan kerabat dekat mereka yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis dalam kehidupan. Dengan tingginya budaya individualis yang memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan pemikiran secara

kolektif maka akan dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Hofstede, (2001) menggambarkan salah satu dimensi budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi adalah masculinity. Maskulinitas (MAS) mengacu pada sejauh mana nilai-nilai seperti ketegasan, agresi dan daya saing dihargai. Dalam budaya maskulin, kesuksesan diukur dengan kekayaan yang diciptakan atau diperoleh (Geert Hofstede, 2011). Oleh karena itu, tujuan akhir lebih penting daripada cara untuk mencapai tujuan tersebut (Getz & Volkema, 2001).

Tingginya budaya maskulinitas maka seseorang ataupun masyarakat akan menempuh jalur apa pun untuk mendapatkan apa yang diinginkan meskipun dengan menggunakan cara yang tidak benar (Getz & Volkema, 2001). Efek dari budaya maskulinitas ini mungkin akan lebih terasa jika kondisi perekonomian sebuah negara sangatlah rendah. Mengingat budaya dari maskulinitas yang diukur dari kekayaan dan pencapaian seseorang membuat kemungkinan terjadinya

korupsi di sebuah negara akan meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada pada negara tersebut ingin sebuah pencapaian serta pengakuan sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang ilegal dan tidak etis.

Uncertainty avoidance (UAI) atau penghindaran ketidakpastian merupakan budaya yang dalam hal ini bisa diartikan dengan tingkat toleransi dari masyarakat atas hal-hal yang mengandung ambiguitas. Hal ini menandakan adanya masyarakat yang merasa sebuah ketidaknyamanan terhadap situasi yang tidak tertata dan tidak terstruktur (Geert Hofstede, 2011). Dalam budaya ini masyarakat erat dengan menjauhi kemungkinan yang buruk yang menyimpang terhadap hukum ataupun keyakinan atas sebuah kebenaran. Getz & Volkema, (2001) menyatakan uncertainty avoidance (UAI) adalah sejauh mana seseorang dalam masyarakat menoleransi penyimpangan dan risiko. Dalam masyarakat dengan budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi, anggota masyarakat lebih cenderung merasa tidak nyaman dalam menghadapi situasi yang tidak terduga

karena mereka cenderung lebih menyukai stabilitas yang kuat.

Adanya kondisi perekonomian yang ada pada sebuah negara membuat seseorang menghindari ketidakpastian dalam hidupnya. Perbuatan atas perilaku menyimpang dari norma kehidupan akan membuat masyarakat yang ada pada negara tersebut mendapatkan ketidakpastian dimasa yang akan datang terkait dengan hukum. Ketidakpastian yang terkait pada hukum yang bisa menjerat masyarakat pada hukuman pidana, membuat masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku.

Orientasi jangka Panjang atau Long-term orientation (LTO) mengukur hubungan antara masa lalu, sekarang dan masa depan. Masyarakat dengan tingkat orientasi jangka panjang yang tinggi beradaptasi dengan perubahan dan hal-hal baru dengan cepat dan lebih mungkin untuk menantang otoritas (Mensah, 2014). Dengan kondisi perekonomian yang ada pada sebuah negara dan tingginya budaya orientasi jangka panjang yang dianut oleh masyarakat yang ada pada negara tersebut maka akan lebih bisa

untuk berpikir jangka panjang untuk tidak melakukan hal yang tidak seharusnya yang akan menyebabkan masalah hukum dikemudian hari. Dengan adanya budaya yang berpikir jangka panjang, hal ini dapat mendorong seseorang untuk menjauhi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya termasuk melakukan tindakan korupsi.

Hofstede, (2001) menggambarkan salah satu dimensi budaya yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi adalah indulgence. Budaya indulgensi merupakan sebuah budaya yang erat dengan sebuah kebebasan dimana masyarakat mempunyai kebebasan dalam melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa puas dan senang. Sebaliknya, pengekangan identik dengan pembatasan terhadap sesuatu yang membuat individu tidak bisa berbuat sesuai yang ia inginkan (Geert Hofstede, 2011). Kaitannya dengan kondisi perekonomian yang rendah, kebahagiaan yang dikehendaki oleh masyarakat akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan seseorang untuk mencari kebahagiaan

dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Perilaku ini akan meningkatkan tindakan korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Untuk menguji efek moderasi dimensi budaya pada hubungan antara kondisi perekonomian dan korupsi, kami mengusulkan hipotesis berikut:

H4a: Power distance memperlemah hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara

H4b : Individualism maka memperkuat hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H4c: Masculinity secara memperlemah hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H4d: Uncertainty avoidance memperkuat hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H4e: Long-term orientation memperkuat hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan

tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

H4f: Indulgence memperkuat hubungan negatif antara kondisi perekonomian dan tingkat korupsi yang terjadi di sebuah negara.

3. Metodologi penelitian

3.1. Sampel dan pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan negara-negara yang ada di dunia yang terdaftar pada indeks yang akan diteliti pada sumber tertentu. Indeks yang akan digunakan dalam mengukur corporate governance menggunakan indeks data dengan merujuk pada penelitian (Boateng et al. 2021) yang menggunakan data Corporate Governance (CG) yang diambil dari indeks Global Competitiveness Index (GCI) yang diterbitkan setiap tahun oleh World Economic Forum (WEF). Pada variabel kondisi perekonomian, penelitian ini menggunakan beberapa referensi dalam menentukan pengukuran yang akan digunakan yang mengacu pada penelitian Scholl & Schermuly (2020), Sharma & Paramati (2021), Anderson (2015), Kimbro (2002), dan Seleim & Bontis (2009) yang menggunakan GDP per capita yang diambil dari the Global Competitiveness Index of the World

Economic Forum. Selain itu, dalam budaya nasional, penelitian ini akan menggunakan data yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan budaya yang ada pada sebuah negara. Penelitian ini menggunakan referensi penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya Park (2003) Getz & Volkema (2001), Achim (2016), Seleim & Bontis (2009), dan Boateng et al. (2021) yang menggunakan data dimensi budaya nasional yang disediakan oleh Hofstede Insight.

Adapun dalam pengukuran variabel korupsi, penelitian ini menggunakan indeks yang umum dipakai dalam mengukur tingkat korupsi pada sebuah negara dengan referensi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan beberapa diantaranya adalah Sullivan et al. (2013), Getz & Volkema (2001), Seleim & Bontis (2009), Park (2003), Boateng et al. (2021), Scholl & Schermuly (2020) dan Sharma & Paramati (2021) yang menggunakan indeks dari Corruption Perception Index (CPI) Transparency International (TI) sebagai ukuran dalam menentukan tingkat korupsi sebuah negara. Pada penelitian ini, peneliti mengambil time series yang

dimulai dari tahun 2010-2011 hingga 2017-2018. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan indeks rata-rata GCG di sebuah negara yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), dan World Bank national accounts data yang tersedia dengan format yang sama adalah mulai dari 2010-2011 hingga 2017-2018. Adapun jumlah negara yang akan diambil dalam penelitian ini sejumlah 89 negara. Pengambilan jumlah negara ini didasari atas ketersediaan data dari indeks budaya yang tersedia pada situs Hofstede Insight.

3.2. Definisi operasional variabel dan pengukuran

1. Variable dependen

Korupsi: korupsi menggunakan CPI yang dikembangkan oleh Transparency International (TI). Ini mengukur tingkat korupsi yang dirasakan di negara-negara di seluruh dunia, dengan skor dari 0 (paling korup) hingga 100 (sangat tidak korup). CPI diterbitkan setiap tahun oleh TI.

2. Variabel Independen

- a. GCG : Tata kelola perusahaan adalah variabel independen pada penelitian ini. Pengukuran CG diukur menggunakan 6

variabel: (a) perilaku etis perusahaan; (b) kekuatan standar audit dan pelaporan; (c) efektivitas dewan perusahaan; (d) perlindungan pemegang saham minoritas; (e) kekuatan perlindungan investor. Data tata kelola perusahaan (CG) diambil dari indeks daya saing global (GCI) yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) setiap tahun. Pengukuran setiap variabel dari GCG menggunakan angka 1-7 yang menandakan bahwa 1 merupakan nilai terendah dan 7 nilai tertinggi kecuali pengukuran pada variabel kekuatan perlindungan investor yang diukur dari angka 1-10.

- b. Kondisi perekonomian: Pada variabel ini peneliti menggunakan data pendapatan per kapita atau Gross Domestic Bruto (GDP). Adapun data yang akan digunakan merupakan data yang berasal dari Global Competitiveness Index of the World Economic Forum yang datanya berasal dari data World Bank (<https://data.worldbank.org/>).

3. Variabel moderasi

Budaya: Pengukuran budaya ini mengambil dari pengukuran yang berasal dari Hofstede (2011) yang terdiri dari 6 dimensi yaitu Power distance, Individualism, Uncertainty Avoidance, Masculinity, Long Term Orientation, dan Indulgence. Pada setiap 6 variabel pengukuran budaya akan diukur menggunakan angka 1-100 yang menunjukkan bahwa angka 1 merupakan angka terendah dan 100 merupakan angka tertinggi.

4. Variabel Kontrol

Political right: variabel kontrol ini akan diukur menggunakan data political right yang diambil dari Freedom House yang akan menggunakan angka mulai dari 1 yang menunjukkan bahwa kebebasan berpolitik pada negara tersebut sangatlah bebas. Sedangkan angka 7 yang menunjukkan bahwa kebebasan berpolitik pada negara tersebut tidaklah bebas.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{COR} = & \alpha + \beta_1\text{GCG} + \beta_2\text{ECD} + \\ & \beta_3\text{aGCG.PD} + \beta_3\text{bGCG.IDV} + \\ & \beta_3\text{cGCG.MAS} + \beta_3\text{dGCG.UAI} + \\ & \beta_3\text{eGCG.LTO} + \beta_3\text{fGCG.IND} + \\ & \beta_4\text{aECD.PD} + \beta_4\text{bECD.IDV} + \\ & \beta_4\text{cECD.MAS} + \beta_4\text{dECD.UAI} + \\ & \beta_4\text{eECD.LTO} + \beta_4\text{fECD.IND} + \beta_5\text{PR} \\ & + e \end{aligned}$$

3.2.Data analisis

Penelitian ini menggunakan PLS versi 3.0. penggunaan ini dipilih dikarenakan PLS dilengkapi dengan analisis variabel moderator dengan pendekatan variabel interaksi yang membuatnya (user-friendly). Analisa regresi Partial Least Square (PLS) bertujuan untuk menghasilkan model yang mentransformasikan seperangkat variabel eksplanatori yang saling berkorelasi. Koefisien parameter regresi PLS diperoleh dari korelasi langsung antar variabel.

Analisis keterkaitan antara berbagai variabel dilakukan dengan pendekatan uji statistik SEM (Structural Equation Model, SEM). Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif

kompleks secara simultan (Latan & Ghozali, 2015).

4. Hasil dan pembahasan

4.1.Statistik deskriptif

Pada hasil statistic deskriptif pada tabel: 2 dapat dilihat bahwasanya angka tertinggi dari korupsi ialah 83 dengan nilai terendah yaitu 5 dan rata-rata nilai korupsi ialah 39. Adapun untuk kondisi perekonomian, angka tertinggi dari GDP ditunjukkan dengan nilai 119.966.035.000 dan GDP terendah sebesar 428.927.000. pada variable GCG terdapat 5 pengukuran yaitu behaviour of firms (ETHI) dengan nilai tertinggi 67 dan terendah 26, strength of auditing and reporting standards (SARS) memiliki nilai tertinggi di angka 6,7 dan terendah ditunjukkan pada angka 2,8, efficacy of corporate board (ACB) memberikan angka tertinggi sebesar 6,4 dan 3,1 dengan angka terendah, protection of minority share- holders' interests (PMSI) memberikan hasil dengan nilai tertinggi 6,2 dan terendah sebesar 2,6, dan strength of investor protection (SIP) memberikan nilai 9,7 yang tertinggi dengan 2,3 yang paling rendah.

Budaya dengan 6 dimensi menunjukkan hasil nilai tertinggi 100 yang ditunjukkan oleh power distance,

4.2. Hasil pengukuran data

Pengujian validitas yang

Indikator	Mean	Median	Min	Max	SD
ETHICS	4,2.580	3,9.000	2,6.000	67.000	10.233
SARS	4,8.608	4,7.000	2,8.000	6,7.000	14.796
ACB	4,7.651	4,7.000	3,1.000	6,4.000	6.630
PMSI	4,2.560	4,1.000	2,6.000	6,2.000	7.656
SIP	5,8.664	5,9.000	2,3.000	9,7.000	13.548
EC	20.747.414.974	11.420.555.000	428.927.000	119.966.035.000	22.653.627.746
PD	63.949	67.000	11.000	100.000	20.545
IDV	40.557	33.000	10.000	91.000	22.527
MAS	49.598	50.000	5.000	100.000	18.356
UA	66.860	70.000	8.000	100.000	22.153
LTO	46.267	46.000	4.000	100.000	23.963
IDN	45.012	44.000	0.000	100.000	22.346
CPI	49.537	57.000	5.000	83.000	20.424
PR	2.659	2.000	1.000	7.000	1.811

masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, dan indulgence sedangkan indivisulism memberikan skor tertinggi pada angka 91. Adapun nilai terendah dari power distance, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, dan indulgence dan indivisulism sebesar 11, 5, 8, 4, 0, dan 10 pada setiap dimensi. Adapun pada variable control yaitu political right memberikan angka tertinggi sebesar 7,00 dengan terendah sebesar 1,00.

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan convergency validity dan discriminant validity. Convergency validity (validitas konvergen) dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item skor atau komponen skor dengan konstruk skor yang dihitung menggunakan Smart PLS 3.0 M3. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala

Tabel 2. Statistik deskriptif

pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Latan & Ghozali, 2012).

Pada pengujian convergent validity yang dilakukan pada pengujian data ini menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai average variance extracted (AVE) diatas 0,5. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa semua konstruk valid. Pada pengujian data yang dilakukan, terdapat hasil yang menunjukkan bahwa semua konstruk menunjukkan hasil yang valid yang ditandai dengan nilai diatas 0,5. Hasil dari validitas diskriminan ini terlampir pada tabel: 3.

Pada tahap selanjutnya pada pengujian validitas adalah pengujian discriminant validity. Pada pengukuran ini hasil discriminant validity dilihat melalui hasil dari model pengukuran reflektif yang didasarkan atas hasil dari nilai discriminant validity. Pada pengujian ini jika korelasi antar konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya maka konstruk tersebut dinyatakan valid. Hasil pada pengujian menunjukkan bahwa semua konstruk valid. Hal ini ditunjukkan dari nilai dari hasil setiap item pada hasil dari cross

loading pengukuran lebih besar dari ukuran konstruk lainnya. Selain itu, pengujian dari discriminant validity (Fornell–Larcker criterion of constructs) menunjukkan hasil yang valid yang ditandai dengan nilai AVE yang lebih besar dari nilai korelasi dari setiap interkonstruksi. Selanjutnya, hasil dari discriminant validity Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan hasil yang valid yang ditandai dengan nilai setiap konstruk lebih rendah dari 0,9. Hasil pengujian dari discriminant validity dapat dilihat pada tabel: 4 hingga tabel: 6. Selanjutnya, pengukuran reabilitas pada penelitian yang menggunakan PLS dapat dilakukan dengan menghitung Composite Reliability dan Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik adalah ketika nilai dari Composite Reliability $> 0,7$. Selain itu, metode lain yang dapat digunakan dalam mengukur reliabilitas dari sebuah indikator adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik adalah ketika nilai dari Cronbach Alpha dari sebuah indikator $> 0,6$ (Latan & Ghozali, 2015).

Pada pengujian reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Composite Reliability diatas 0,7 dan memiliki nilai Cronbach Alpha diatas

0,6. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. Hasil dari pengujian reliabilitas ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Construct reliability and validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
COR	1,000	1,000	1,000	1,000
EC	1,000	1,000	1,000	1,000
GCG	0,848	0,930	0,894	0,638
IDN	1,000	1,000	1,000	1,000
IDV	1,000	1,000	1,000	1,000
LTO	1,000	1,000	1,000	1,000
MAS	1,000	1,000	1,000	1,000
PD	1,000	1,000	1,000	1,000
PR	1,000	1,000	1,000	1,000
UA	1,000	1,000	1,000	1,000

	COR	EC	GCG	IDN	IDV	LTO	MAS	PD	PR	UA
ACB	-0,729	0,661	0,902	0,381	0,572	0,106	-0,028	-0,534	-0,355	-0,365
CPI	1,000	-0,843	-0,834	-0,292	-0,704	-0,187	0,151	0,712	0,553	0,285
EC	-0,843	1,000	0,730	0,349	0,665	0,178	-0,049	-0,681	-0,426	-0,293
IDN	-0,292	0,349	0,348	1,000	0,209	-0,485	0,025	-0,344	-0,238	-0,171
IDV	-0,704	0,665	0,603	0,209	1,000	0,136	0,031	-0,714	-0,517	-0,235
LTO	-0,187	0,178	0,101	-0,485	0,136	1,000	0,068	0,064	-0,149	0,100
MAS	0,151	-0,049	-0,057	0,025	0,031	0,068	1,000	0,145	0,017	-0,051
PD	0,712	-0,681	-0,588	-0,344	-0,714	0,064	0,145	1,000	0,521	0,288
PMSI	-0,731	0,645	0,934	0,355	0,535	-0,018	-0,033	-0,538	-0,257	-0,410

PR	0,553	-0,426	-0,349	-0,238	-0,517	-0,149	0,017	0,521	1,000	-0,040
SARS	-0,418	0,354	0,619	0,220	0,372	0,038	0,024	-0,333	-0,227	-0,194
SIP	-0,353	0,222	0,532	0,077	0,180	0,101	0,000	-0,158	-0,197	-0,207
UA	0,285	-0,293	-0,409	-0,171	-0,235	0,100	-0,051	0,288	-0,040	1,000
ETHICS	-0,901	0,805	0,914	0,281	0,608	0,163	-0,126	-0,617	-0,332	-0,386

Tabel 4: Discriminant validity (cross loading)

Tabel 5: Discriminant validity (Fornell–Larcker criterion of constructs)

	COR	EC	GCG	IDN	IDV	LTO	MAS	PD	PR	UA
COR	1,000									
EC	-0,843	1,000								
GCG	-0,834	0,730	0,798							
IDN	-0,292	0,349	0,348	1,000						
IDV	-0,704	0,665	0,603	0,209	1,000					
LTO	-0,187	0,178	0,101	-0,485	0,136	1,000				
MAS	0,151	-0,049	-0,057	0,025	0,031	0,068	1,000			
PD	0,712	-0,681	-0,588	-0,344	-0,714	0,064	0,145	1,000		
PR	0,553	-0,426	-0,349	-0,238	-0,517	-0,149	0,017	0,521	1,000	
UA	0,285	-0,293	-0,409	-0,171	-0,235	0,100	-0,051	0,288	-0,040	1,000

Tabel 6: Discriminant validity Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	COR	EC	GCG	IDN	IDV	LTO	MAS	PD	PR	UA
COR										
EC	0,843									
GCG	0,862	0,74								
IDN	0,292	0,349	0,362							
IDV	0,704	0,665	0,624	0,209						
LTO	0,187	0,178	0,117	0,485	0,136					
MAS	0,151	0,049	0,058	0,025	0,031	0,068				

PD	0,712	0,681	0,601	0,344	0,714	0,064	0,145		
PR	0,553	0,426	0,377	0,238	0,517	0,149	0,017	0,521	
UA	0,285	0,293	0,43	0,171	0,235	0,100	0,051	0,288	0,04

4.3. Hasil uji hipotesis dan pembahasan.

Tabel 7 : Hasil pengujian hipotesis

	Original Sample (O)	P Values	Kesimpulan
EC -> CPI	-0,521	0,000	Didukung
GCG -> CPI	-0,424	0,000	Didukung
PD-GCG -> CPI	0,087	0,020	Tidak terdukung
IDV-GCG -> CPI	-0,044	0,298	Tidak terdukung
MAS-GCG -> CPI	0,051	0,064	Tidak terdukung
UA-GCG -> CPI	-0,137	0,000	Didukung
LTO-GCG -> CPI	-0,035	0,289	Tidak terdukung
IDN-GCG -> CPI	-0,053	0,043	Didukung
PD-EC -> CPI	-0,086	0,046	Didukung
IDV-EC -> CPI	0,133	0,003	Didukung
MAS-EC -> CPI	-0,087	0,003	Didukung
UA-EC -> CPI	0,190	0,000	Didukung
LTO-EC -> CPI	0,021	0,536	Tidak terdukung
IDN-EC -> CPI	0,098	0,030	Didukung
PR -> CPI	0,178	0,000	Didukung

Pada penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa CGG masih

memegang peran penting dalam terjadinya korupsi pada sebuah negara.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barros et al. (2019), Agyei-Mensah (2017), Sullivan et al. (2013), dan McGee (2009) yang menyatakan bahwasanya peran dari GCG sangatlah penting untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Selain itu, kondisi perekonomian juga menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sharma & Paramati (2021), Ahmed (2017), Kimbro (2002), dan Getz & Volkema (2001). Mereka menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kondisi perekonomian dengan tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi pada sebuah negara adalah budaya yang ada pada negara tersebut. Pada penelitian ini, budaya diambil untuk menjadi variabel moderasi antara GCG dan korupsi yang terjadi. Dengan menggunakan data dari berbagai negara yang ada dunia, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa rata-rata

dengan baiknya GCG pada sebuah negara, hal ini dapat mengurangi tingkat korupsi, yaitu tingkat korupsi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan praktik GCG yang buruk. Namun, dengan dimasukkannya variabel budaya yang ada pada negara tersebut, efek GCG pada korupsi menjadi tidak stabil pada berbagai tingkat signifikansi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa budaya uncertainty avoidance dan indulgence memperlemah hubungan antara GCG terhadap korupsi sedangkan budaya masculinity memperkuat hubungan antara GCG dan korupsi meskipun pada budaya masculinity tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Adapun budaya power distance menunjukkan hasil yang bertentangan dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa budaya power distance memperkuat hubungan antara GCG dan korupsi. Untuk budaya long-term orientation memberikan hasil bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap hubungan antara GCG terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Dari sisi kondisi perekonomian, masuknya variabel budaya juga

menjadikan hasil dari kondisi perekonomian terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara menjadi tidak stabil. Penelitian ini memberikan hasil bahwa budaya power distance dan masculinity dapat memperlemah hubungan antara kondisi perekonomian terhadap korupsi. Sedangkan budaya individualism, uncertainty avoidance dan indulgence mempunyai peran dalam memperkuat hubungan antara kondisi perekonomian

terhadap korupsi yang terjadi. Adapun variabel long-term orientation tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kondisi perekonomian dan korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

4.4. Hasil pengukuran data

Konstruk	(Nilai R-Square)	Adjusted R-Square
Korupsi	0,897	0,893

Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R₂ semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016). Pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa Adjusted R-Square sebesar 0,893.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa

hipotesis didukung dengan data yang ada. Akan tetapi beberapa hipotesis memiliki hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis awal peneliti. Pada hasil ini dapat disimpulkan bahwa meskipun GCG dan kondisi perkeonomian sebuah negara berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Hal ini menandakan dan mengindikasikan bahwasanya dengan GCG yang baik maka akan dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan pada suatu negara. Selain itu kondisi perekonomian juga memegang peran penting dalam menekan kasus

terjadinya korupsi pada sebuah negara. Lebih dari itu, dengan adanya variabel budaya membuat hasil dari GCG dan kondisi perekonomian terhadap tingkat korupsi yang terjadi menjadi tidak stabil. Perbedaan budaya yang ada pada sebuah negara menyebabkan hubungan antara GCG dan kondisi perekonomian sebuah negara terhadap korupsi menjadi tidak menentu. Hal inilah yang menyebabkan korupsi yang ada pada sebuah negara sangat sulit dihilangkan.

Dikarenakan korupsi merupakan fenomena yang sulit untuk dihilangkan, maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan diteliti seperti pendidikan, politik, agama serta kesadaran masyarakat guna memberikan gambaran yang lebih luas dalam mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara. Penelitian ini hanya terbatas oleh faktor perekonomian serta sosial yang ada pada sebuah negara. Pada penelitian selanjutnya tentunya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain terkait korupsi diluar dari konteks perekonomian dan sosial seperti stabilitas politik, agama, kesadaran akan kecurangan serta dari Pendidikan. Hal ini tentunya akan bisa memberikan

lebih banyak gambaran untuk mengurangi tingkat korupsi yang terjadi pada sebuah negara.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2017). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). In Survei Fraud Indonesia, ACFE Association of Certified Fraud Examiners. ACFE INDONESIA CHAPTER. <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>
- Achim, M. V. (2016). Cultural Dimension of Corruption: A Cross-Country Survey. *International Advances in Economic Research*, 22(3), 333–345. <https://doi.org/10.1007/s11294-016-9592-x>
- Agyei-Mensah, B. K. (2017). The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study. *Corporate Governance: Bingley*, 17(2), 284–304. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2015-0150>
- Anderson, B. B. (2015). Corrupting activities and economic development. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 11(1), 64–70.

- <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-07-2014-0020>
- Bardhan, P. (2006). The economist's approach to the problem of corruption. *World Development*, 34(2), 341–348. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.011>
- Boateng, A., Wang, Y., Ntim, C., & Glaister, K. W. (2021). National culture, corporate governance and corruption: A cross-country analysis. *International Journal of Finance and Economics*, 26(3), 3852–3874. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1991>
- Chiu, C. Y., Gelfand, M. J., Yamagishi, T., Shteynberg, G., & Wan, C. (2010). Intersubjective culture: The role of intersubjective perceptions in cross-cultural research. *Perspectives on Psychological Science*, 5(4), 482–493. <https://doi.org/10.1177/1745691610375562>
- Davis, J. H., & Ruhe, J. A. (2003). Perceptions of Country Corruption: Antecedents and Outcomes. *Journal of Business Ethics*, 43(4), 275–288.
- dela Rama, M. (2012). Corporate Governance and Corruption: Ethical Dilemmas of Asian Business Groups. *Journal of Business Ethics*, 109(4), 501–519.
- <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1142-0>
- Dieckmann, O. (1996). Cultural determinants of economic growth: Theory and evidence. *Journal of Cultural Economics*, 20(4), 297–320. <https://doi.org/10.1007/s10824-005-7320-0>
- Farber, D. B. (2005). Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter? *Accounting Review*, 80(2), 539–561. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.2.539>
- Fischer, R., Ferreira, M. C., Milfont, T., & Pilati, R. (2014). Culture of Corruption? The Effects of Priming Corruption Images in a High Corruption Context. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45(10), 1594–1605. <https://doi.org/10.1177/0022022114548874>
- Fu, Y. (2019). The value of corporate governance: Evidence from the Chinese anti-corruption campaign. *North American Journal of Economics and Finance*, 47(June 2018), 461–476.

- <https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.06.001>
- Getz, K. A., & Volkema, R. J. (2001). Culture, Perceived Corruption, and Economics. *Business & Society*, 40(1), 7–30. <https://doi.org/10.1177/000765030104000103>
- Granato, J., Inglehart, R., & Leblang, D. (1996). The Effect of Cultural Values on Economic Development: Theory, Hypotheses, and Some Empirical Tests. *American Journal of Political Science*, 40(3), 607. <https://doi.org/10.2307/2111786>
- Greif, A. (1994). Cultural beliefs and the organization of society: a historical and theoretical reflection on collectivist and individualist societies. *Journal of Political Economy*, 102(5), 912–950. <https://doi.org/10.1086/261959>
- Hofstede, Geert. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. *Psychology and Cross Cultural*, 45(1), 116–130. <https://doi.org/10.1177/0305735616650994>
- Hofstede, Greet. (2001). Culture's consequences_ comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (second edi). International Educational and Profesional Publisher.
- House, R., Javidan, M., Hanges, P., & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: An introduction to project GLOBE. *Journal of World Business*, 37(1), 3–10. [https://doi.org/10.1016/S1090-9516\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00069-4)
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kimbrow, M. B. (2002). A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 17(4), 325–350. <https://doi.org/10.1177/0148558X0201700403>
- Kyriacou, A. P. (2016). Individualism-

- collectivism, governance and economic development. *European Journal of Political Economy*, 42, 91–104.
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.11.005>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2015). Partial Least Squares: Concepts, Techniques and Applications using SmartPLS 3.
- Li, J., & Harrison, J. R. (2008). Corporate governance and national culture: A multi-country study. *Corporate Governance*, 8(5), 607–621.
<https://doi.org/10.1108/14720700810913278>
- Mensah, Y. M. (2014). An Analysis of the Effect of Culture and Religion on Perceived Corruption in a Global Context. *Journal of Business Ethics*, 121(2), 255–282.
<https://doi.org/10.1007/s10551-013-1696-0>
- Michael, C. J., & Meckling, W. H. (1976). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.
<https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Morck, R., Wolfenzon, D., & Yeung, B. (2005). Corporate governance, economic entrenchment, and growth. *Journal of Economic Literature*, 43(3), 655–720.
<https://doi.org/10.1257/002205105774431252>
- OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance. In G20/OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr>
- Omidi, M., Min, Q., & Omidi, M. (2017). Combined effect of economic variables on fraud, a survey of developing countries. *Economics and Sociology*, 10(2), 267–278.
<https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-2/20>
- Park, H. (2003). Determinants of Corruption: A Cross-National Analysis. *Multinational Business Review*, 11(2), 29–48.
<https://doi.org/10.1108/1525383X200300010>
- Saha, S., & Gounder, R. (2013). Corruption and economic development nexus: Variations across income levels in a non-linear framework. *Economic Modelling*, 31(1), 70–79.

- <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.11.012>
- Scholl, W., & Schermuly, C. C. (2020). The Impact of Culture on Corruption, Gross Domestic Product, and Human Development. *Journal of Business Ethics*, 162(1), 171–189. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3977-0>
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: a cross-national study. *Journal of Intellectual Capital*, 10(1), 165–184. <https://doi.org/10.1108/14691930910922978>
- Sharma, C., & Paramati, S. R. (2021). Does financial development reduce the level of corruption? Evidence from a global sample of 140 countries. *International Journal Of Finance & Economics*, May 2018, 5093–5109. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2056>
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Sullivan, J. D., Wilson, A., & Nadgrodkiewicz, A. (2013). The Role of Corporate Governance in Fighting Corruption. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1–21.
- Tanzi, V. (1994). Fiscal Affairs Department Corruption. *Governmental Activities, and Markets* \J.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76, 1–11. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04633-0_1
- Vitell, S. J., Nwachukwu, S. L., & Barnes, J. H. (1993). The effects of culture on ethical decision-making: An application of Hofstede's typology. *Citation Classics from The Journal of Business Ethics: Celebrating the First Thirty Years of Publication*, 12(10), 119–129. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4126-3_6
- Wraith, R., & Simpkins, E. (2012). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4, 1–212. <https://doi.org/10.4324/9780203835722>